

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

- Alfiah, Ratna Nurul. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: CV. Akademika Presindo.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Assidhiqie, Jimly. dalam Luhut Pangaribuan. 2009. *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Studi Teoritis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Diansyah, Febri Dkk. 2011. *Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Farid, A.Z. Abidin. 1961. *Sekelumit Goresan tentang Penuntut Umum di Indonesia*. Makassar: Persadja.
- Hakim, Abdul. 1996. Nusantra. *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Chandra M. 2014. *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibunan, Malayu S.P. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Isra, Saldi. 2009. *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Kadri Husin dan Rizki Husin. 2012. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Loe Mau, Alfonsius Gebhard. 2011. *Permohonan Praperadilan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Depok: FH Universitas Indonesia.
- Loqman, Loebby. 1990. *Pra-Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahendra, Yusril Ihza. 2002. *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, cet.I. Jakarta: Tim Pakar Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Cetakan ke-2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Meyliana, Devi. 2010. *Tinjauan Yuridis Praperadilan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perpajakan*. Depok: FH Universitas Indonesia.
- Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta: STIH IBLAM. 2004.
- Muhamad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhamad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulyadi, Lilik. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2007.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Poernomo, Bambang. 1985. *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981*. Yogyakarta: Liberty.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Prints, Darwan. 1989. *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*. Jakarta : Djambatan.
- Prints, Darwan. 1993. *Tinjauan Umum tentang Praperadilan, cetakan 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Priyanto, Anang. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- R. Subekti. 1995. *Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Soeroeangan.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. 2006.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- S.H. Alatas. 1987. *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Jakarta: Media Pratama.
- S.M. Amin. 1971. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta : Pradnja Paramita.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Tanusubroto. 1993. *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.

Toha, Suherman. 2009. *Koordinasi Lembaga Hukum dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta : BPHN Departemen Hukum dan HAM.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

_____, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

_____, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016

MoU antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-049/A/J.A/03/2012 dan Nomor : B/23/III/2012 serta Nomor : Spj-39/01/03/2012

Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

C. Kamus, Jurnal, Internet :

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)
- Nugroho, Hibnu. 2013. *Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. Purwokerto : Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13 No. 3:392-402.
- Mohede, Noldy. 2012. *Tugas dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Vol.XX/No.1/Januari-Maret/2012.

- Badjuri, Achmad. 2011. “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 18 No. 1, Maret 2011.
- M. Syamsudin. 2010. Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan, *Jurnal Hukum*. Vol. 17 No.3 Juli 2010.
- <https://news.detik.com/berita/d-3439709/kalah-di-praperadilan-bupati-nganjuk-kpk-ini-mengecewakan>
- http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf